

**KONSEP SYURA DAN DEMOKRASI DALAM AL-QUR'AN  
DALAM PANDANGAN AKTIVIS KAMMI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
(Analisis Nalar Bayani, Burhani, dan Irfani Muhammad Abid al-Jabiri)**

**Ahmad Zaenuri**

IAIN Sultan Amai Gorontalo  
email: zaenuriahmad@iaingorontalo.ac.id

**Nurul Aini N. Pakaya**

Universitas Muhammadiyah Gorontalo  
email: nurulainipakaya@gmail.com

**Abstrak**

Terdapat perbedaan pandangan dalam menerima konsep demokrasi pada gerakan kemahasiswaan. Sebagian menerima konsep tersebut dan sebagian lagi menolaknya. Penerimaan dan penolakan terjadi, umumnya dikarenakan perbedaan dalam memaknai konsep “*syura*” dalam al-Qur’an. Penelitian ini membahas pandangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dalam memaknai konsep *syura* dalam al-Qur’an dengan menggunakan teori kritik nalar Arab Muhammad Abid al-Jabiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia memaknai *syura* identik dengan demokrasi saat ini. Dengan demikian, metode penelaahan yang digunakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia lebih mendekati pendekatan burhani yang disebut al-Jabiri.

**Kata Kunci: Syura, Demokrasi, KAMMI**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarah Islam, konsep “*syura*” selalu diidentikkan dengan sistem politik yang digunakan pada pemerintahan Islam. Hal ini dikuatkan dengan pandangan bahwa apa yang disebut dengan musyawarah atau *syura* memang berasal dari kebiasaan Arab pra-Islam yang kemudian diIslamkan oleh al-Qur’an.<sup>1</sup> Selain itu, *syura* juga mendapatkan legitimasi dari Nabi langsung,<sup>2</sup> sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus yang melibatkan Nabi dan para sahabat bahkan melibatkan kaum kafir dalam proses musyawarah. Piagam Madinah, merupakan salah satu bentuk dari hasil *syura* yang dilakukan antara kaum muslimin dan kaum kafir Madinah.

---

<sup>1</sup>A. Syafi’i Ma’arif, *Islam, Kekuatan dan Kegamangan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 4.

<sup>2</sup>Dalam sebuah hadits Nabi diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

“مَا خَابَ مَنْ اسْتَشَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ، وَلَا خَالَ مَنْ اقْتَصَدَ” “tidak akan kecewa seseorang yang beristikhrah, dan tidak akan menyesal seseorang yang melakukan musyawarah”. Lihat Abi al-Qosim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmiy at-Tabraniy, *Al-Mu’jam as-Shogir li at-Tabraniy*, Jil. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 78.

Berbanding terbalik dengan *syura*, demokrasi sebagai sistem politik lebih dimaknai sebagai produk Barat.<sup>3</sup> Keberadaannya lebih dulu sebelum Islam datang, yaitu sejak adanya peradaban Yunani. Hal ini dapat dilihat dari akar kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” dan “*kratos*” yang masing-masing berarti pemerintahan dan rakyat. Secara etimologis demokrasi berarti pemerintahan (*demos*) dan rakyat (*kratos*), yaitu pemerintahan rakyat.<sup>4</sup> Lebih lanjut demokrasi dimaknai sebagai (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung (2) kesamaan di depan hukum (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan, dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.<sup>5</sup>

Kemiripan interpretasi makna *syura* dengan demokrasi, menimbulkan perbedaan dalam menerima konsep demokrasi terbagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang menentang secara keseluruhan adanya paham demokrasi dalam Islam, karena menurut kelompok ini di dalam Islam terdapat konsep *syura* yang lebih sesuai dengan umat Islam dan penolakan mereka terhadap demokrasi karena demokrasi berasal dari luar Islam, bahkan terdapat yang menghukumi bidah.<sup>6</sup> *Kedua*, kelompok yang menerima demokrasi dalam Islam, akan tetapi juga mengakui adanya perbedaan-perbedaan antara konsep demokrasi dan *syura*.<sup>7</sup> *Ketiga*, kelompok yang menganggap bahwa demokrasi identik dengan *syura*.<sup>8</sup>

Perbedaan cara pandang tersebut dimungkinkan terjadi karena perbedaan metodologi yang digunakan dalam memahami makna teks al-Quran. Pada kelompok pertama yang menentang demokrasi dan menerima *syura* secara mutlak, lebih dominan menggunakan pemaknaan secara tekstualis (*bayani*), sehingga kata demokrasi sendiri tidak ditemukan di dalam al-Quran dan secara langsung mereka menolaknya karena bukan *indogeneus* Islam. Kelompok kedua tidak hanya terpaku kepada teks (*bayani*), akan tetapi menggunakan penalaran rasio (*burhani*) sehingga kesimpulan yang diambil lebih inklusif dari kelompok pertama. Sedangkan kelompok terakhir yaitu yang berpandangan bahwa *syura* dan demokrasi itu sama, atau dapat dikatakan hanyalah terjadi perbedaan nomenklatur sedangkan esensinya satu. Kelompok terakhir ini relatif dekat antara pendekatan *burhani* dan *irfani*, karena lebih mementingkan esensi daripada bentuknya.

Adalah Muhammad Abed al-Jabiri salah seorang tokoh intelektual muslim asal Maroko yang mencoba membagi epistemologi keilmuan Arab (Islam) menjadi tiga tersebut,

---

<sup>3</sup>Pengantar redaksi dalam Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syura: Tradisi, Partikularitas, Universalitas*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. v.

<sup>4</sup>Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), hlm. 28-29.

<sup>5</sup>R. Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara, 1994), hlm. 5.

<sup>6</sup>Tokoh yang paling terkenal atas penolakannya terhadap konsep-konsep yang dianggap berasal dari luar Islam, pada umumnya, dan demokrasi, pada khususnya, adalah Sayyid Qutb dan al-Maududi, Lihat Issa J. Boullota, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 83.

<sup>7</sup>Kelompok ini adalah kelompok mayoritas, di antara tokohnya adalah Muhammad Said al-Ashmawi yang mengatakan bahwa konsep *syura* di dalam al-Qur'an bisa dikembangkan melalui demokrasi. Lihat Ulil Absar Abdalla (ed), *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 3.

<sup>8</sup>Sadek Jawad Sulaiman termasuk dalam kelompok ini, menurutnya *syura* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Lihat Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum & Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 128.

*bayani*, *burhani*, dan *irfani*. *Bayani* merupakan struktur pengetahuan yang menempatkan teks (wahyu) sebagai sumber pengetahuan. Sebaliknya *burhani*, dimaknai sebagai argumentasi yang kuat dan jelas, yaitu penggunaan nalar rasional dalam memperoleh pengetahuan. Yang terakhir yaitu *irfani* merupakan pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakekat oleh Tuhan kepada hambanya (*kasyf*) setelah adanya olah ruhani (*riyadhah*) yang dilakukan atas dasar cinta (*mahabbah*).<sup>9</sup> Ketiga hal ini yang kemudian dikenal sebagai “Kritik Nalar Arab” Muhammad Abed al-Jabiri.<sup>10</sup>

Seperti halnya pada aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (selanjutnya disingkat KAMMI) Komisariat UIN Sunan Kalijaga dalam melihat konsep demokrasi dan *syura* tentu tidak lepas dari ketiga pandangan di atas. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki kedekatan dengan gerakan fundamentalis Mesir Ikhwanul Muslimin, maka metode pemaknaan tekstualis (*bayani*) menjadi salah satu *manhaj* KAMMI dalam memaknai *syura* dan demokrasi. Akan tetapi sebagai kumpulan aktivis muda mahasiswa, KAMMI tidak selamanya stagnan dalam memandang permasalahan *syura* dan demokrasi. Oleh sebab itu perbedaan pandangan bisa dimungkinkan terjadi terhadap aktifis KAMMI sendiri.

Wacana *syura* dan demokrasi merupakan wacana menarik untuk dibicarakan, penerimaan secara total maupun penolakan secara kritis terhadap keduanya yang dilatar belakangi dari pemaknaan sumber ajaran Islam, sedikit banyak telah memperkaya khasanah keilmuan. Kehadiran aktivis KAMMI yang dikenal sebagai gerakan “fundamental” mahasiswa menjadi semakin menarik, pada satu sisi KAMMI memiliki kedekatan epistemologi *bayani* layaknya gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir, pada sisi lain KAMMI adalah kumpulan anak-anak muda yang cenderung menggunakan tataran idealis/rasio (*burhani*) dalam menyikapi satu masalah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kritik Nalar Arab al-Jabiri**

Pembahasan ini diawali dengan teori *Naqdul Aql al-Arabiyy* “Kritik Nalar Arab” Muhammad Abed al-Jabiri. Dalam teori tersebut al-Jabiri membagi metodologi keilmuan Islam terbagi atas tiga epistememologi, *bayani*, *burhani*, dan *irfani*.

*Bayani* adalah metode pemikiran Arab yang menekankan otoritas teks (*nash*) secara langsung dan tidak langsung kemudian dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi (*istidlal*). Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pemahaman mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap bersandar pada teks. Dalam *bayani* rasio, dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan

---

<sup>9</sup>Nganinun Naim, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 383.

<sup>10</sup>Secara langsung penulis belum menemukan referensi yang mengatakan bahwa kritik nalar Arab hanyalah fokus pada permasalahan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Akan tetapi dari *grand theory* “Kritik Nalar Arab” Muhammad Abid al-Jabiri pembahasan pokoknya adalah ketiga hal tersebut, Lihat Pengantar Penerjemah dalam Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwin al-Aql al-Arabi*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 5.

kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan sasaran bidik metode bayani adalah aspek eksoterik (syari'at).<sup>11</sup>

Selanjutnya *burhani*, merupakan penyandaran pengetahuan kepada kemampuan manusia, baik melalui indra, pengalaman, realitas (*al-waqi'*) baik realitas alam, sosial, humanitas, keagamaan, maupun proses rasional. Ibnu Rusyd sebagai tokoh filosof muslim klasik, telah menyebut-nyebut jenis epistemologi ini.<sup>12</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *irfani* yaitu pengungkapan pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakekat oleh Tuhan kepada hamba-Nya (*Kasyf*) setelah adanya olah ruhani (*riyadhah*) yang dilakukan atas dasar cinta (*Mahabbah*). Sasaran bidik irfani adalah aspek esoterik, apa yang berada dibalik teks.<sup>13</sup>

Konsep *syura* (Musyawarah) adalah metode pengambilan keputusan secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengetahui yang terbaik dan benar bagi kepentingan bersama, dan menghindari sikap memutlakkan pendapat pribadi. Sikap ini juga merupakan konsekuensi logis dari sikap tauhid (*monoteisme*) dalam ajaran Islam yang menempatkan Allah SWT. Sebagai yang Maha Mengetahui, Maha Sempurna, Maha Mutlak dan Maha Besar. Dengan kata lain, orang yang bersikap otoriter dan anti musyawarah bisa jatuh pada sikap syirik.<sup>14</sup> Di dalam al-Quran ada tiga ayat yang akar katanya menunjukkan musyawarah, yaitu surat al-Baqarah (2): 233, dalam Ali Imran (3): 159 dan dalam al-Syura (42): 38.<sup>15</sup>

Pemaknaan terhadap konsep *syura* dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari cara pandang terhadap al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Dari interpretasi ayat-ayat al-Quran yang mengandung kata *syura* ini kemudian, melahirkan setidaknya tiga pandangan. Pandangan pertama dengan model corak penafsiran bayani yang mengakui *syura* secara mutlak dan menolak demokrasi karena merupakan produk barat. Selanjutnya kelompok yang moderat, menganggap bahwa di dalam *syura* dan demokrasi terdapat kesamaan dan perbedaan, sehingga penerimaan terhadap demokrasi masih perlu dilakukan peninjauan secara kritis. Kelompok yang kedua ini lebih dekat dengan penalaran *burhani*. Bagi kelompok yang terakhir, baik *syura* maupun demokrasi baginya sama saja. Yang terpenting menurut kelompok ini adalah esensi dari demokrasi itu sendiri, tanpa perlu memisahkan antara Islam maupun Barat. Kelompok terakhir inipun masih dekat dengan penalaran *burhani* dan *irfani*.

## 2. Sejarah Berdirinya KAMMI

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada awalnya merupakan gerakan mahasiswa ke-Islaman yang berbasis masjid kampus. Hampir semua kampus-kampus utama negeri memperlihatkan intensitas yang tinggi dalam kegiatan ini. *Prototipe* dari gerakan masjid ini muncul dari Masjid Salman ITB pada awal tahun 1970-an, dengan mengadopsi ideologi dan "intelektual gerakan" dari Latihan Mujahid Dakwah (LMD). LMD adalah gerakan mahasiswa Islam dengan penekanan yang kuat pada doktrin tauhid dan

---

<sup>11</sup>Muhammad Abed al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Araby*, hlm. 14-20. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu: Kajian Atas Dasar Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Belukar, 2008), hlm. 201.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 233.

<sup>13</sup>A. Khudori Sholeh, *Wacana Baru Filsafat Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 194.

<sup>14</sup>Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1263.

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui, atas Pelbagai Permasalahan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 469.

perhatian yang khusus terhadap ancaman perang pemikiran (*ghazwul fikr*) dengan ide-ide sekular Barat. Penekanan pada materi tauhid dan *ghazwul fikr* yang mengambil inspirasi dari doktrin gerakan Islam yang terkenal di Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin.<sup>16</sup>

Dari tahap penting yang menarik tentang aktivitas ke-Islaman berbasis masjid kampus, dalam perjalanan dan perkembangannya mengalami metamorfosis sebagai konsekuensi dari pencarian format dan metode yang sejalan dengan tuntutan lapangan dan respon terhadap perkembangan situasi-kondisi lingkungannya. Di antara tahap penting metamorfosis ini adalah ketika di penghujung akhir tahun 1990-an, melalui sejumlah aktifis lainnya mereka mentransformasikan dirinya ke dalam gerakan sosial baru, yaitu KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).<sup>17</sup>

### 3. KAMMI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dinamika pergerakan dan ekspansi organisasi kemahasiswaan KAMMI semenjak kelahirannya tahun 1998 hingga saat ini, telah mengembangkan jaringannya di PTU (perguruan tinggi umum) dan PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam), termasuk di kampus UIN Sunan Kalijaga. Hanya saja perkembangan gerakan KAMMI di PTAI tidak sehebat di kampus-kampus umum. Hal ini dimungkinkan karena ideologinya yang terlalu fundamental. Selain itu di kampus-kampus Islam sudah banyak menyebar organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMII, dan IMM yang cenderung lebih moderat.

Dalam perkembangannya, KAMMI di UIN Sunan Kalijaga sejak kelahiran hingga saat ini dapat di abstraksikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

29 Maret 1998

KAMMI dideklarasikan di Malang. Pada tahun yang sama KAMMI Yogyakarta dideklarasikan dan mulai melakukan agenda aksi menuntut reformasi.

1998-2000

Pasca Soeharto lengser, kehidupan sosial politik berangsur pulih, mahasiswa kembali ke kampus. Pasca Muktamar I KAMMI mulai mengadakan perekrutan anggota baru. (Duarah Marhalah I). Pada tahun ini ada beberapa mahasiswa IAIN yang bergabung dan mulai melakukan perintisan pendirian KAMMI di kampus UIN Sunan Kalijaga (dulu IAIN Sunan Kalijaga).

---

<sup>16</sup>Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelgensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 538.

<sup>17</sup>Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi, Kiprah Politik Aktivistis Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokratisasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi*, (Solo: Era intermedia, 2003), hlm. 7.

<sup>18</sup>Data Sejak 29 Maret 1998 sampai dengan tahun 2004-2005 merupakan hasil penelitian Abdul Muhaimin, Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Lihat Abdul Muhaimin, *Manajemen Dakwah Kampus: Studi Model Dakwah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 33-34.

- 29 April 2000 KAMMI Komisariat UIN dideklarasikan. Fatahillah Abror diangkat sebagai ketua pertama KAMMI komisariat UIN Sunan Kalijaga.
- 2000-2001 Muskom I KAMMI UIN, terpilih ketua adalah Teguh Ariyanto. Fase ini merupakan fase peletakan pondasi dakwah kampus. Dalam fase ini, mulai dirancang konsepsi perencanaan dakwah kampus. Konsepsi tersebut adalah pembagian wilayah garap menjadi tiga lini besar, yaitu Lini Kaderisasi, Lini Siyasi dan Lini Akademik. Prestasi pengurus periode ini adalah berhasil merekrut anggota baru berjumlah besar dan generasi yang terekrut itulah kemudian menjadi tulang punggung dakwah kampus, bahkan hingga saat ini.
- 2001-2002 Fase ini dibawah dibawah kepemimpinan Romadhon Hidayat, yang telah berpengalaman sebagai Sekum pada era Abor dan Teguh. Di bawah kepemimpinannya, KAMMI menekankan pada dua agenda strategis utama, yaitu (1) Penajaman konsepsi dakwah yang integral dan dinamis, (2) Pembentukan basis massa. Sebagaimana era sebelumnya, mahasiswa baru sangat antusias untuk bergabung mengikuti DM I. Angkatan Osama (angkatan ke-III) dan *Intifadhah* (angkatan ke-IV) masing-masing diikuti tidak kurang dari 70 orang. Fase ini bisa disebut sebagai fase penyempurna pondasi dakwah dengan maraknya komunitas mahasiswa muslim yang mendekati lingkungan *harokah* (Qoidah Ijtima' iyah) dikampus UIN Sunan Kalijaga.
- 2002-2003 Profesionalisme adalah isu utama fase ini. Musyawarah Komisariat III yang digelar 17-19 Mei 2002 mengamanatkan spirit "Dari kader Profesional Menuju Aksi Masif" . Fase ini titik berat program pada pelibatan kader untuk mengambil peran utamanya sebagai generasi KAMMI, yaitu peran kepemimpinan (*daurul qiyadi*). Prestasi emas periode Rijalul

Imam ini adalah kesuksesannya melakukan pembangunan jaringan informasi antar aktivis dakwah kampus di PTAI. Dalam periode ini, terjadi pemilwa di kampus, tepatnya Maret 2003. Kader KAMMI mencoba mengambil peran struktural *student goverment* kampus dengan Partai PAS.

2003-2004

Fase ini bertepatan dengan Pemilu 2004 lebih menekankan pada “Soliditas Internal dalam Suasana Tarbawi” dan mulai merambah wilayah dakwah akademik. Ketua KAMMI periode ini adalah Zayudi. Periode ini lebih menampilkan perapihan infrastruktur organisasi yang kokoh

2004-2005

Dalam fase ini telah terbangun *frame* dakwah yang integral. Secara relatif infrastruktur yang telah dibangun pada periode berikutnya telah bisa berjalan.

2013-Sekarang

Pada masa ini, KAMMI akan mengangkat isu ke-Indonesiaan. Jargon-jargon yang dikenalkan adalah tokoh-tokoh muslim seperti Agus Salim, dll. Tema ke-Indonesiaan digunakan untuk menghilangkan stigma negatif bahwa KAMMI lebih dekat dengan gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir.<sup>19</sup>

#### **4. Visi, Misi Paradigma Gerakan dan Prinsip Gerakan KAMMI**

Visi KAMMI adalah sebagai wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Dari rumusan visi tersebut, terpetakan dengan jelas apa yang diinginkan KAMMI sebagai sebuah organisasi. Ini dapat dilihat dari frasa kalimatnya “Kepemimpinan Nasional” dan “Masyarakat Madani.”<sup>20</sup>

Masyarakat yang di idealkan oleh KAMMI adalah masyarakat yang bebas dari otoritarianisme di mana di dalamnya dipenuhi oleh nilai-nilai keadilan, persamaan, kebebasan, dan kemerdekaan. Lebih lanjut menurut KAMMI, masyarakat madani akan tercapai ketika negara dapat berfungsi secara optimal untuk (1) mencegah terjadinya eksploitasi antar manusia, antar kelompok, dan antar kelas dalam masyarakat, (2) memelihara kebebasan warga negara dan melindungi seluruh warga negara dari penjajahan

---

<sup>19</sup>Rifaldi Kadir, *Ketua KAMMI UIN Sunan Kalijaga 2013-2014*, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2013.

<sup>20</sup>Mahfudz Sidiq, *KAMMI.*, hlm. 209.

asing, (3) menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang, (4) memberantas setiap kejahatan dan mendorong setiap kebaikan yang ada dalam masyarakat dan (5) menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang teduh dan mengayomi setiap warga negara dengan jalan pemberlakuan hukum yang adil.

KAMMI memandang bahwa selama ini cita-cita masyarakat madani tidak pernah terwujud karena kepemimpinan negara selalu dipegang oleh orang-orang dan sistem yang sangat menyengsarakan rakyat, yakni bermula dari era kolonial Belanda dan Jepang yang kemudian berlanjut pada era kepemimpinan pasca proklamasi. Dengan demikian dibutuhkan pemimpin yang amanah dan mampu menggerakkan rakyat dan mengarahkannya untuk mencapai cita-cita kebangsaannya.

Dalam pandangan KAMMI, kepemimpinan yang ideal berada dalam diri ummat Islam. KAMMI melihat bahwa ketidakberanian dan ketidakmauan ummat Islam untuk mengambil peran-peran kepemimpinannya membuat bangsa ini jatuh kepada pemimpin yang tidak layak untuk memimpin, yakni mereka yang tidak amanah sehingga cenderung untuk bertindak eksploitatif dan destruktif. KAMMI memandang bahwa sangat tidak relevan jika terjadi pemisahan antara agama dan politik. pemisahan antara agama dan politik, sebagai bagian dari sekulerisme, akan menjerumuskan bangsa ini pada dekadensi moral yang berujung pada krisis bangsa.<sup>21</sup>

- a. Membina keislaman, keimanan dan ketaqwaan mahasiswa muslim Indonesia.
- b. Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, dan politik mahasiswa.
- c. Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang robbani dan madani.
- d. Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam rangka menyelesaikan permasalahan kerakyatan dan kebangsaan.
- e. Mengembangkan kerjasama antar elemen masyarakat dan semangat menebar kebaikan dan manfaat serta mencegah kemungkaran (*amar maruf nahi munkar*).

## **5. Konsep Syura dan Demokrasi dalam Al-Quran, Menurut Pandangan Aktivis KAMMI UIN Sunan Kalijaga**

### **a. Syura Dalam Al-Quran**

Ada tiga ayat al-Quran yang akar katanya menunjukkan musyawarah, yaitu surat al-Baqarah (2): 233, dalam Ali Imran (3): 159 dan dalam al-Syura (42): 38.<sup>22</sup> Untuk mengetahui bagaimana cara pemaknaan aktivis KAMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga terhadap konsep syura dalam al-qur'an, penulis ketengahkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

Darma Setiawan, selaku mantan ketua KAMMI, yang saat ini aktif memberikan nasihat-nasihat demi perkembangan KAMMI UIN Sunan Kalijaga menuturkan:

---

<sup>21</sup>Andi Rakhmat dan Mukhammad Najib, *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus*, (Solo: Purimedia, 2001), hlm. 173-175.

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui.*, hlm. 469.



“Dalam memaknai *hujjah* (landasan) yang digunakan untuk melihat konsep *syura* dan demokrasi, KAMMI cenderung moderat. KAMMI tidak dengan serta merta menolak demokrasi dan sebaliknya tidak juga langsung mendukung sepenuhnya konsep *syura* dalam sebuah negara. Jika demokrasi adalah sistem yang dianggap baik, maka demokrasi ini yang nantinya akan diterapkan. Akan tetapi yang perlu diingat dari gerakan KAMMI adalah KAMMI tetap melakukan gerakan *syura* “senyap”, dalam artian tujuan akhir KAMMI tetap ingin nantinya bagaimana konsep *syura* yang ada dalam Islam itu bisa di terapkan dalam negara, yaitu apabila kondisi sebuah bangsa ataupun negara sudah memungkinkan.<sup>23</sup>

Berpijak pada penjelasan Darma Setiawan di atas, maka dapat diperoleh pengetahuan bahwa secara tidak langsung KAMMI UIN Sunan Kalijaga tidak menolak demokrasi secara keseluruhan. Demikian juga dengan konsep *syura*, tidak kemudian ditafsirkan mutlak sebagai satu-satunya solusi, akan tetapi jika yang memungkinkan adalah demokrasi, maka demokrasi bisa diterapkan atau bahkan diberikan nilai-nilai Islam. Informasi yang diberikan oleh Darma Setiawan ini juga di benarkan oleh kader KAMMI yang lain.

Abdul Haris, selaku aktifis KAMMI yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga juga menuturkan sebagai berikut:

“Saya melihat sebagaimana Yusuf al-Qardhawi; salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin yang kemudian menjadi “ideologi” KAMMI mengatakan bahwa, antara demokrasi dan *syura* terdapat beberapa kesamaan. Di antara kesamaan tersebut yaitu adanya keterwakilan rakyat dalam menentukan sebuah kebijakan. Hanya saja dalam *syura* keterwakilan tersebut kemudian disebut dengan *ahlul ahli wal adli*. Yang terpenting bagi KAMMI adalah bagaimana tujuan syari’at (*maqasid as-syari’ah*) itu bisa terimplementasikan, walaupun penerapannya lewat demokrasi atau yang lain. Sehingga KAMMI tidak kemudian men-*thagut*-kan demokrasi akan tetapi mengambil dampak kebaikan dari penerapan demokrasi tersebut.<sup>24</sup>

Selain kedua pandangan di atas, penulis juga menemukan pendapat yang menguatkan argumen-argumen tersebut. Ilman Adni al-Farisi, mahasiswa jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah bergabung dengan KAMMI sejak 2011 mengatakan bahwa:

“Saya melihat *syura* dan demokrasi terdapat kesamaan, akan tetapi tidak sama seluruhnya. Demokrasi yang saya pahami sebagai “*demos*” dan “*kratós*” atau pemerintahan rakyat, mengharuskan adanya keterwakilan rakyat, begitu pula dalam *syura*. Sekalipun sebagian ulama-ulama yang dirujuk oleh ikhwan yang

---

<sup>23</sup>Darma Setiawan, *Aktifis KAMMI UIN Sunan Kalijaga*, Wawancara pada tanggal 5 Juni 2013.

<sup>24</sup>Abdul Haris, *Aktifis KAMMI UIN Sunan Kalijaga*, Wawancara 5 Juni 2013.

kemudian di adopsi KAMMI ada yang menolak demokrasi secara mutlak, seperti Sayyid Qutub, akan tetapi generasi berikutnya dalam Ikhwan sendiri seperti Hasan al-Banna berbeda pendapat dengan Sayyid Qutub. Dari sini sebenarnya baik Ikhwan maupun “embrionya” yaitu KAMMI akan menyesuaikan dengan konteks kehidupan. Walaupun KAMMI saat ini sedang mengusung tema “Muslim Negarawan” akan tetapi bukan berarti kemudian KAMMI bersifat eksklusif terhadap sesama atau bahkan terhadap sistem kenegaraan yang bukan Islam.<sup>25</sup>

Dari penuturan para informan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, cara pemaknaan terhadap konsep *syura* dalam al-Quran oleh aktivis KAMMI UIN Sunan Kalijaga adalah tidak terpaku kepada teks. Disini aktivis KAMMI sudah menggabungkan kemampuan nalar untuk menganalisa konsep *syura* dengan konsep lain yang ada, seperti konsep demokrasi. Dengan demikian dalam proses pemaknaan *syura* dalam al-Quran KAMMI berada pada model pemaknaan *burhani*, sekalipun tidak dipungkiri bahwa mereka meyakini kebenaran teks rujukan utama tidak ditinggalkan.

## **b. Demokrasi**

Secara etimologis demokrasi berarti pemerintahan (*demos*) dan rakyat (*kratos*), yaitu pemerintahan rakyat.<sup>26</sup> Lebih lanjut demokrasi dimaknai sebagai (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung (2) kesamaan di depan hukum (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan, dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.<sup>27</sup>

Akan tetapi perlu diketahui bahwa, demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak bisa secara serta-merta diterima mentah-mentah oleh masyarakat muslim. Sebab dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah. Sebagaimana pemikir Islam lebih cenderung mengatakan bahwa, sistem pemerintahan yang cocok di dalam Islam adalah “Demokrasi-Teokrasi” (Teo-Demokrasi).<sup>28</sup> Teo-demokrasi pertama kali di perkenalkan oleh Abu Ala al-Maududi.

Selain persoalan tersebut, yang tak kalah kontroversialnya adalah persoalan perlunya suatu otoritas politik untuk menerapkan seperangkat hukum agama (Islam). Sebagian umat Islam merasa Islamnya belum sempurna kalau “syariat Islam” tidak di

---

<sup>25</sup>Ilman Adni al-Farisi, *Aktivistis KAMMI UIN Sunan Kalijaga*, Wawancara 6 Juni 2013.

<sup>26</sup>Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), hlm. 28-29.

<sup>27</sup>R. Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara, 1994), hlm. 5.

<sup>28</sup>Teodemokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari gabungan antara teokrasi dan demokrasi. Lihat, M. Ainul Abied Shah, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 43.

formalkan dalam struktur kenegaraan<sup>29</sup> sesuatu yang sangat ditentang demokrasi. Sebab, dalam demokrasi tidak boleh ada dominasi politik tertentu, melainkan harus mencerminkan kepentingan seluruh komunitas, baik langsung maupun tidak langsung.  
30

Di tengah perdebatan-perdebatan tentang demokrasi di atas, penulis mencoba melihat bagaimana pandangan aktivis KAMMI terhadap demokrasi.

Rivaldy Kadir, ketua umum KAMMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga menuturkan bahwa.

“Sejatinya KAMMI dalam hal-hal tertentu tidak setuju juga dengan konsep demokrasi. Sebagai contoh tentang suara rakyat adalah suara penentu, maka dari hasil demokrasi belum tentu bahwa keputusan orang banyak tersebut adalah keputusan yang terbaik. Akan tetapi KAMMI dalam hal ini memaknai demokrasi sebagai sesuatu yang berada diluar dari *syura*.

Bagi saya demokrasi adalah sesuatu yang berada diluar *syura*. *Syura* adalah mekanisme yang digunakan dalam pengambilan keputusan, sedangkan demokrasi adalah sistem yang digunakan untuk melaksanakan *syura* tersebut. Dari sini KAMMI lebih bersifat inklusif dalam memandang demokrasi. Demokrasi tidak dimaknai sebagai sesuatu yang berada diluar Islam, karena di dalam prinsip Islam (*syura*) terdapat juga kesamaannya dengan demokrasi.

Dari pemaparan Rivaldy Kadir di atas, dapat dipahami bahwa KAMMI sebagai sebuah organisasi mahasiswa muslim, memandang demokrasi bukanlah sebagai produk Barat yang harus ditolak secara mutlak. Akan tetapi demokrasi dapatlah diambil letak kesamaannya dengan konsep *syura* yang ada dalam Islam. Bahkan dalam praktiknya KAMMI menjadikan *syura* dan demokrasi sebagai dua hal yang berjalan bersama akan tetapi berbeda. *Syura* sebagai mekanisme pengambilan keputusan dan demokrasi sebagai sistem yang digunakan untuk melaksanakan *syura* tersebut.

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh pendapat aktivis KAMMI lainnya. Ahmad Mujayyid Sayyaf, aktivis KAMMI yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2004, mengatakan bahwa:

“KAMMI mengakui bahwa antara demokrasi dan *syura* terdapat perbedaan. Contohnya dalam hal voting, suara terbanyak tidak bisa dijadikan jaminan. Oleh sebab itu KAMMI sendiri dalam kepengurusan organisasi internal, lebih mendahulukan musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal pemaknaan terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan *syura* yang kemudian dikomparasikan dengan konsep demokrasi KAMMI tidak mengakui adanya penafsiran yang mutlak. Dalam runutan sejarah, pemaknaan

---

<sup>29</sup>Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Gugus Press, 2002), hlm. 80.

<sup>30</sup>Charles Churzman, *Islam Liberal*, hlm. 124.

terhadap konsep *syura* saja berbeda-beda. Pada masa nabi, nabi selalu memutuskan masalah dengan bermusyawarah. Pada fase-fase selanjutnya beralih kemudian menjadi sistem ke-khalifahan, monarki, dinasti, sultan, dan hingga saat ini sampai pada demokrasi. Jadi saya berkesimpulan bahwa, demokrasi sekalipun merupakan produk Barat, akan tetapi jika hal itu memungkinkan untuk menciptakan tatanan negara yang baik maka tidak ada salahnya demokrasi diterapkan sebagai sistem politik.<sup>31</sup>

Pendapat salah satu aktivis KAMMI tersebut menguatkan pendapat sebelumnya bahwa, KAMMI UIN Sunan Kalijaga tidak menjadikan demokrasi sebagai sesuatu yang berada di luar Islam, akan tetapi setidaknya demokrasi dapat di Islamisasi dengan nilai-nilai Islam.

Pendapat semacam demikian bisa jadi keluar dari *manhaj* yang diadopsi KAMMI. Salah satu tokoh panutan dalam Ikhwanul Muslimin yang kemudian diadopsi sebagai ideologi KAMMI yaitu Sayyid Qutub yang menolak demokrasi secara mutlak. Menanggapi hal demikian Darma Setiawan mengatakan:

“Saya mengakui bahwa ideologi KAMMI banyak mengambil dari gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir. Akan tetapi sebagaimana gerakan-gerakan organisasi Islam lainnya, tidak serta merta kemudian diadopsi seluruhnya, melainkan disuaikan dengan konsep ke-Indonesiaan. Dari sinilah KAMMI nantinya akan bisa menarik para mahasiswa lebih banyak untuk bergabung, dengan tidak mengambil jargon-jargon yang identik dengan gerakan Islam fundamentalis. Untuk saat ini KAMMI UIN Sunan Kalijaga sedang menggagas hal itu.<sup>32</sup>

Dari berbagai pemaparan tersebut jelaslah bahwa KAMMI, sekalipun memiliki kedekatan secara ideologis dengan gerakan-gerakan fundamentalis yang identik dengan penegakkan syari’at Islam, akan tetapi dalam melihat demokrasi tidak kemudian menjadikan demokrasi sebagai sistem *kufur* seperti halnya organisasi masyarakat Islam Hizbut Tahrir dan lainnya. KAMMI melihat demokrasi sebagai sistem yang di dalamnya terdapat kesamaan dengan prinsip *syura* dalam Islam, walaupun tidak sama seluruhnya. Oleh sebab itu KAMMI menempatkan dirinya sebagai organisasi yang mengakui demokrasi sebagai sistem politik yang bisa diterapkan jika itu merupakan hal yang baik untuk diterapkan.

## **6. Pandangan aktivis KAMMI terhadap Konsep *Syura* dan Demokrasi, dilihat dari Nalar Kritis Muhammad Abed al-Jabiri**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Muhammad Abed al-Jabiri adalah intelektual muslim yang membagi epistemologi keilmuan Arab (Islam) menjadi tiga

---

<sup>31</sup>Ahmad Mujayyid Sayyaf, *Aktivis KAMMI UIN Sunan Kalijaga*, Wawancara pada tanggal 6 juni 2012.

<sup>32</sup>Darma Setiawan, *Aktivis KAMMI UIN Sunan Kalijaga*, Wawancara pada tanggal 5 Juni 2013.

epistem, *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. *Bayani* adalah proses perolehan pengetahuan berdasarkan penjelasan teks, *burhani* rasio atau akal, dan *irfani* yaitu pengungkapan makna di balik teks dengan berdasarkan intuisi atau dengan menyingkap tabir yang menghalangi penyinaran *ilahi*. Ketiga epistem ini kemudian digunakan untuk melihat model pemaknaan konsep *syura* dan demokrasi pada aktivis KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam melihat pandangan aktivis KAMMI terhadap konsep *syura* dan demokrasi penulis kemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut.

Cara pemaknaan terhadap konsep *syura* dalam al-Quran oleh aktivis KAMMI UIN Sunan Kalijaga adalah tidak terpaku kepada teks. Disini aktivis KAMMI sudah menggabungkan kemampuan nalar untuk menganalisa konsep *syura* dengan konsep lain yang ada, seperti konsep demokrasi. Sebaliknya dalam melihat demokrasi aktivis KAMMI Juga tidak serta merta menolaknya karena alasan demokrasi produk Barat. Akan tetapi KAMMI mampu mengakumulasikan menjadi satu tatanan konsep yang saling beriringan. Jika demokrasi adalah sistem yang dapat menjadikan sesuatu itu lebih baik, maka demokrasi dijalankan, walaupun dalam tujuan akhir KAMMI tetap bercita-cita bahwa Islam (*syura*) akan menjadi seluruh sistem dalam kehidupan.

Berpijak pada hasil penelitian tersebut di atas jelaslah bahwa KAMMI tidak terikat pada pemaknaan tekstualis ayat al-Quran yang berkaitan dengan *syura*. *Syura* bagi KAMMI dimaknai lebih luas, bukan hanya pada sistem musyawarah dalam kelompok sebagaimana pada masa nabi. Akan tetapi sudah dikaitkannya dengan sistem demokrasi modern. Dengan demikian aktivis KAMMI melihat *syura* dan demokrasi dalam al-Qur'an tidaklah terpaku pada teks dan bukan pula berdasarkan intuisi langsung dari Tuhan, melainkan berdasarkan ilmu pengetahuan (rasio atau akal) yang dalam bahasa Muhammad Abed al-Jabiri adalah epistemologi *burhani*. Hanya saja pengetahuan yang diperoleh dari *burhani* disini, tidak dapat dilepaskan dari pemaknaannya yang mendalam atas teks al-Quran (*bayani*).

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi di atas, dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Syura* dalam pandangan aktivis KAMMI merupakan sistem politik yang belum final. Interpretasi terhadap makna *syura* selamanya akan terus berkembang. Kata *syura* yang dipahami juga tidak terpaku sebagaimana *syura* pada zaman nabi dan khulafa ar-Rasyidin, akan tetapi bisa jadi *syura* memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan demokrasi. Demokrasi tidak dimaknai sebagai produk Barat (non muslim) yang harus ditolak mentah-mentah, tapi sebagai sesuatu yang perlu ditinjau kemudian diambil dampaknya yang baik-baik. Dengan demikian maka interpretasi KAMMI terhadap *syura* lebih diwarnai epistem *burhani* walaupun tidak meninggalkan spirit dasar keilmuannya dari teks (*Bayani*).
2. Dilihat dari kritik Nalar Arab Muhammad Abed al-Jabiri pandangan terhadap konsep *syura* dan demokrasi dalam al-Quran aktivis KAMMI UIN Sunan Kalijaga berada pada

*Madani*

Volume 1 Nomor 1 Desember 2018.p.1-16.

<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/md>

posisi epistem *burhani*, akan tetapi tidak dipungkiri pengetahuan *burhani* tersebut merupakan lanjutan dari interpretasi terhadap teks al-Quran (*bayani*).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdalla Ulil Absar, *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: Paramadina, 2002
- Al-Jabiri, Muhammad Abed, *Syura: Tradisi, Partikularitas, Universalitas*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- At-Tabraniy, Abi al-Qosim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmiy, *Al-Mu'jam as-Shogir li at-Tabraniy*, Jil. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Boullota Issa J., *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri Yogyakarta: LKiS, 2001
- Dahlan Abdul Aziz. dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Fatah R. Eep Saefulloh, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1994
- Krisna Didi, *Kamus Politik Internasional*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993
- Kurzman Charles, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum & Heri Junaidi, Jakarta: Paramadina, 2001
- Latif Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelgensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Bandung: Mizan, 2005
- Ma'arif A. Syafi'i, *Islam, Kekuatan dan Kegamangan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1993
- Muhajir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Muslih Muhammad, *Filsafat Ilmu: Kajian Atas Dasar Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Belukar, 2008
- Naim Nganinun, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Rakhmat Andi & Najib Mukhammad, *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus*, Solo: Purimedia, 2001
- Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Gugus Press, 2002

*Madani*

Volume 1 Nomor 1 Desember 2018.p.1-16.

<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/md>

Shah M. Ainul Abied, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001

Shihab M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui, atas Pelbagai Permasalahan Ummat*, Bandung: Mizan, 1998

Sholeh A. Khudori, *Wacana Baru Filsafat Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004

Sidiq Mahfudz, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi, Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokratisasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi*, Solo: Era Intermedia, 2003